

**REFORMASI ATAU POLITISASI? PEMBINGKAIAN ISU PENEMPATAN POLRI
DI MEDIA ONLINE**

***(Analisis Framing Komparatif Tempo.co dan Kompas.com Periode
November 2024–Februari 2026)***

Dinda Khairiya Prasastya¹, Catur Suratnoaji²
^{1,2} Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIBPOL,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
22043010340@student.upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study examines how Tempo.co and Kompas.com, two of Indonesia's most-read online news portals, framed the public debate over repositioning the Indonesian National Police (Polri) from directly under the President to under the Ministry of Home Affairs (Kemendagri), a policy discourse that remained undecided throughout the study period. Using a qualitative framing analysis grounded in Robert N. Entman's four-element model (define problems, diagnose causes, make moral judgments, treatment recommendation), the study analyzed 23 purposively sampled news articles (12 from Tempo.co, 11 from Kompas.com) published between November 2024 and February 2026. Findings show that Tempo.co exhibited a dynamic, two-phase framing shift: initially framing the repositioning proposal as a constitutional threat to police independence (December 2024), then reversing after the August 2025 civil-society protests and the formation of the Police Reform Acceleration Commission to frame Polri's current position as an unchecked “superbody” requiring structural correction. Kompas.com, by contrast, maintained formal balance throughout while substantively leaning toward rejecting repositioning, favoring cultural and institutional reform within the existing command structure. These divergent trajectories confirm the workings of political mediatization and the social construction of reality, demonstrating that both outlets actively shaped, rather than merely reported, public understanding of one of Indonesia's most consequential unresolved institutional reform debates.

Keywords: framing analysis, Robert N. Entman, Polri institutional reform, online media, political mediatization

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana Tempo.co dan Kompas.com, dua portal berita online dengan pembaca terbanyak di Indonesia, membingkai perdebatan publik mengenai penempatan kembali Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari langsung di bawah Presiden menjadi di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebuah wacana kebijakan yang belum mencapai keputusan final sepanjang periode penelitian. Menggunakan analisis framing kualitatif berlandaskan model empat elemen Robert N. Entman (define problems, diagnose causes, make moral judgments, treatment recommendation), penelitian ini menganalisis 23 artikel berita hasil purposive sampling (12 dari Tempo.co, 11 dari Kompas.com) yang terbit sepanjang November 2024 hingga Februari 2026. Temuan menunjukkan bahwa Tempo.co mengalami pergeseran bingkai dua fase yang dinamis: pada mulanya membingkai usulan reposisi sebagai ancaman

konstitusional terhadap independensi kepolisian (Desember 2024), kemudian membalikkan arah setelah gelombang demonstrasi masyarakat sipil Agustus 2025 dan pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri, membingkai posisi Polri saat ini sebagai lembaga superboddy tanpa pengawasan yang memerlukan koreksi struktural. Sebaliknya, Kompas.com konsisten mempertahankan keberimbangan formal sepanjang periode, namun secara substantif cenderung menolak reposisi dan lebih mendukung pembenahan kultural-institusional dalam struktur komando yang ada. Perbedaan arah pemingkai ini mengonfirmasi bekerjanya teori mediatisasi politik dan konstruksi realitas sosial, membuktikan bahwa kedua media tidak sekadar melaporkan, melainkan turut aktif membentuk pemahaman publik atas salah satu perdebatan reformasi kelembagaan paling konsekuensial di Indonesia yang belum terselesaikan.

Kata Kunci: analisis framing, Robert N. Entman, reformasi kelembagaan Polri, media online, mediatisasi politik

A. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkedudukan langsung di bawah Presiden sejak Reformasi 1998 memisahkan Polri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan No. VII/MPR/2000, yang kemudian dikukuhkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2002. Sebelumnya, pada masa Orde Baru, Polri dan TNI tergabung dalam satu wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), struktur yang dinilai bertentangan dengan prinsip supremasi sipil. Pengaturan pascareformasi ini dimaksudkan untuk menjamin independensi Polri dari intervensi birokrasi kementerian sekaligus memastikan akuntabilitasnya langsung kepada kepala negara sebagai representasi kehendak rakyat (Kurniawan, 2025).

Oleh karena itu, setiap wacana yang mempersoalkan kedudukan kelembagaan Polri sesungguhnya sedang mempertanyakan ulang salah satu capaian paling fundamental dari demokratisasi Indonesia pascareformasi, yakni relasi sipil-militer yang dibangun dengan susah payah selama lebih dari dua dekade.

Pada akhir tahun 2024, isu restrukturisasi kelembagaan Polri kembali mengemuka setelah Ketua DPP PDI Perjuangan mengusulkan agar Polri dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan argumen mencegah intervensi kepolisian dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Usulan tersebut memicu benturan narasi tajam tujuh dari delapan fraksi Komisi III DPR RI menolak, SETARA Institute menilai usulan itu bertentangan dengan Pasal

30 UUD 1945, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan posisi Polri di bawah Presiden sebagai kehendak reformasi, sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan mempertahankan posisi Polri “sampai titik darah penghabisan”. Sepanjang November 2024 hingga Februari 2026, perdebatan ini berlangsung tanpa keputusan final dari pemerintah maupun parlemen, sebuah kondisi keterbukaan yang justru menjadikan peran framing media sangat signifikan dalam membentuk pemahaman publik terhadap salah satu keputusan kelembagaan terpenting dalam sejarah reformasi kepolisian Indonesia.

Pemahaman publik atas isu ini tidak terbentuk secara langsung, melainkan dimediasi oleh media massa. (Strömbäck & Esser, 2014) menegaskan bahwa mediatisasi politik (mediatization of politics) menjadikan media bukan sekadar pelapor, melainkan aktor aktif yang ikut membentuk realitas politik melalui logika media (media logic) masing-masing institusi. Dalam kerangka ini, (Entman, 1993) menyediakan perangkat analitis untuk membedah bagaimana media melakukan seleksi

dan penonjolan (salience) aspek tertentu dari realitas guna mendorong definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan rekomendasi penanganan tertentu baik melalui apa yang dimasukkan maupun apa yang dihilangkan dari teks berita. Adalah sebuah proses yang, menurut (Berger & Luckmann, 1991), pada dasarnya adalah konstruksi realitas sosial yang berlangsung melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Tempo.co dan Kompas.com dipilih sebagai objek penelitian karena keduanya bukan hanya media dengan jangkauan pembaca terbesar dengan Kompas.com menempati posisi kedua media online paling banyak diakses di Indonesia dengan keterpilihan 37%, sementara Tempo.co masuk 10 besar dengan 16% (Reuters Institute, 2025) tetapi juga merepresentasikan dua logika media yang berbeda secara terukur dan mengakar dalam sejarah. Tempo.co mewarisi tradisi jurnalisme investigatif dan fungsi watchdog demokrasi sejak era Majalah Tempo (1971), yang secara empiris terbukti konsisten membingkai isu kewenangan kepolisian sebagai ancaman terhadap negara hukum (Hasibuan et al., 2026; Adinda & Azeharie, 2023). Kompas.com,

sebagai perpanjangan digital Harian Kompas (1965), merepresentasikan tradisi jurnalisme berimbang dan moderat yang cenderung menghindari posisi konfrontatif terhadap kekuasaan (Muslyha, Boer, Nurliah, & W.S., 2025). Preseden metodologis ini turut diperkuat oleh temuan (Adinda & Azeharie, 2023) pada kasus Ferdy Sambo, yang menunjukkan pola serupa pada isu hukum kepolisian yang berbeda bukti bahwa perbedaan logika media di antara keduanya bukan sekadar asumsi, melainkan pola yang berulang.

Studi-studi framing terdahulu atas institusi Polri umumnya berfokus pada peristiwa insidental, kasus kriminal, atau kontestasi elektoral (Amin et al., 2022; Adinda & Azeharie, 2023; Muslyha et al., 2025), sehingga belum tersedia kajian yang secara spesifik membedah framing atas isu kebijakan kelembagaan yang bersifat politis-struktural seperti reposisi Polri. Kekosongan ini bukan sekadar celah akademik, melainkan juga memiliki implikasi praktis tanpa kajian framing atas isu semacam ini, tidak tersedia alat evaluasi untuk menilai apakah media telah menjalankan fungsi informasinya secara bertanggung jawab dalam isu yang menyangkut

fondasi ketatanegaraan. Ketidadaan keputusan final justru menjadikan momen ini paling relevan untuk dikaji, sebab pada tahap inilah framing media bekerja paling kuat dalam membentuk, bukan sekadar melaporkan, arah perdebatan publik.

Signifikansi isu ini juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang relasi sipil-militer di Indonesia. (Kardi, 2014) mencatat bahwa demokratisasi relasi sipil-militer pascareformasi merupakan proses bertahap yang belum sepenuhnya tuntas, sehingga setiap upaya menata ulang kewenangan aparat keamanan negara berpotensi membuka kembali perdebatan lama mengenai batas kontrol sipil atas institusi bersenjata.

Kebaruan penelitian ini terletak pada masuknya kajian ke ranah kebijakan publik-konstitusional tersebut, dengan rumusan masalah: bagaimana perbandingan framing pemberitaan mengenai isu penempatan Polri di bawah Kemendagri pada Tempo.co dan Kompas.com? Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan konstruksi framing kedua media melalui empat elemen model Robert N. Entman, sekaligus menguji apakah perbedaan logika media di antara

keduanya menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda atas satu isu kelembagaan yang sama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing model Robert N. Entman (1993), berpijak pada paradigma konstruksionis yang memandang berita bukan sebagai cerminan realitas yang netral, melainkan hasil konstruksi wartawan dan institusi media berdasarkan sudut pandang dan kepentingan tertentu (Eriyanto, 2012). Sejalan dengan karakter penelitian kualitatif yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dan menekankan pemaknaan di atas generalisasi (Sugiyono, 2019), objek penelitian adalah pembungkaman terhadap isu penempatan Polri di bawah Kemendagri pada kedua media, dengan fokus pada bagaimana redaksi masing-masing mengonstruksi realitas melalui judul, lead, pemilihan narasumber, dan diksi. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka.

Keempat elemen framing Entman diterjemahkan menjadi panduan operasional: define problems

membedah bagaimana kedua media mendefinisikan isu reposisi Polri, diagnose causes mengidentifikasi aktor yang dianggap sebagai penyebab munculnya masalah, make moral judgments menelusuri nilai atau argumen moral yang melegitimasi suatu pandangan, dan treatment recommendation menelusuri solusi yang ditawarkan dalam teks berita. Keempat panduan ini diterapkan secara identik pada seluruh 23 artikel agar hasil analisis dapat dibandingkan secara sistematis antarmedia.

Sampel penelitian ditentukan melalui purposive sampling dengan tiga kriteria seleksi yang diterapkan konsisten pada kedua media: relevansi tematik, representasi aktor (aparatus kepolisian, anggota DPR, organisasi masyarakat sipil, lembaga kajian, dan pemerintah), dan kesesuaian periode pemberitaan. Penelusuran awal dilakukan melalui mesin pencari internal kedua situs media dengan kata kunci "Polri di bawah Kemendagri" untuk rentang 1 Oktober 2024–31 Maret 2026. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini menganalisis 23 artikel berita sebagai korpus akhir, terdiri atas 12 artikel Tempo.co dan 11 artikel Kompas.com yang terbit pada dua

gelombang pemberitaan: November–Desember 2024 (saat isu pertama kali meledak pascakontroversi netralitas Pilkada 2024) dan Oktober 2025–Februari 2026 (saat isu kembali menguat seiring rekomendasi Komisi Reformasi Polri).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap sistematis. Pertama, tahap tekstual, yakni membedah setiap artikel menggunakan empat elemen framing Entman yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgments, dan treatment recommendation yang diterapkan secara identik pada kedua media agar hasilnya dapat dibandingkan. Kedua, tahap interpretasi, yang memerhatikan penonjolan aspek (salience), komposisi narasumber,

dan kecenderungan bingkai dominan pada masing-masing media. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan, yang mendeskripsikan konstruksi realitas yang dibangun kedua media secara menyeluruh dan membandingkan keduanya untuk menjawab apakah perbedaan logika media (media logic) menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda atas isu yang sama. Validitas data dijaga melalui adekuasi referensial, konsistensi penerapan instrumen framing pada seluruh artikel, dan transparansi analitis; penelitian ini tidak menggunakan triangulasi data karena fokusnya adalah kedalaman interpretasi teks, bukan verifikasi silang antarsumber data.

Tabel 1 Perbandingan Elemen Framing Tempo.co dan Kompas.com

Elemen	Tempo.co	Kompas.com
Define Problems	Bergeser dari 'ancaman inkonstitusional' menjadi 'urgensi mendesak' akibat status superboby Polri; dipicu demonstrasi Agustus 2025 & Komisi Reformasi Polri.	Konsisten: pilihan kebijakan yang dilematis, berisiko kebuntuan politik (political deadlock).
Diagnose Causes	Bergeser dari manuver elitis PDI-P menjadi akumulasi kekecewaan publik & tuntutan reformasi struktural.	Konflik antar-elite pascapemilu, intervensi oknum politisi, lemahnya pengawasan negara.
Make Moral Judgment	Bergeser dari kepatuhan konstitusi menuju pembenaran moral atas tuntutan akuntabilitas publik.	Netralitas analitis berbasis praktik negara maju, diselaraskan dengan suara ormas keagamaan demi stabilitas.
Treatment Recommendation	Solusi struktural: mendesak Komisi Percepatan Reformasi Polri merampungkan reorganisasi garis komando.	Solusi institusional-prosedural: menaati suara DPR, optimalisasi Kompolnas, reformasi kultural.

Sumber: Olah data peneliti, 2026

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil Objek Penelitian

Tempo.co, di bawah PT Tempo Inti Media Tbk, merupakan perpanjangan digital Majalah Tempo (1971) yang didirikan oleh Goenawan Mohamad bersama sejumlah jurnalis lain setelah meninggalkan Majalah Ekspres karena perbedaan pandangan mengenai independensi redaksi. Majalah ini dua kali dibredel pada era Orde Baru di tahun 1982 dan 1994 akibat sikap kritisnya terhadap kekuasaan, dan bertransformasi menjadi portal Tempo.co pada 2008. Warisan historis ini menempatkan Tempo.co sebagai media yang secara institusional berkomitmen pada fungsi watchdog demokrasi. Kompas.com, di bawah PT Kompas Cyber Media, merupakan perpanjangan digital Harian Kompas yang didirikan oleh P.K. Ojong dan Jakob Oetama pada 1965 dengan visi menjadi penyalur informasi sekaligus sarana pendidikan publik. Sejak awal, Harian Kompas mengusung jurnalisme humanisme, kehati-hatian editorial, dan keberimbangan (cover both sides), karakter yang kemudian melekat pada seluruh platform di bawah kelompok

Kompas Gramedia. Perbedaan warisan institusional inilah yang mendasari perbedaan logika media dalam membingkai isu reposisi Polri.

Pembingkaian Tempo.co:

Pergeseran Bingkai Dua Fase

Temuan menunjukkan bahwa Tempo.co membingkai isu ini melalui kecenderungan reformasi struktural yang dinamis, bukan statis. Pada periode awal (1–10 Desember 2024), Tempo.co mendefinisikan wacana reposisi bukan sebagai solusi administratif, melainkan sebagai “sumber risiko baru” yang mengancam independensi kepolisian. Salah satu artikel awal korpus, berjudul “Anggota Komisi III DPR Tolak Wacana Polri di Bawah Kemendagri: Tak Perlu Ulang Masa Lalu” (1 Desember 2024), menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah Kemendagri “justru berpotensi menciptakan intervensi politik lebih besar”, diksi yang mengubah wacana penataan organisasi menjadi indikator ancaman serius terhadap netralitas penegakan hukum. Diagnose causes diarahkan pada manuver politik PDI-P pascakontroversi netralitas Pilkada, sementara make moral judgment menegaskan bahwa Polri “bukan alat

pemerintah tertentu” dan reformasi tidak boleh “diputarbalikkan ke masa lalu” pemilihan diksi yang secara eksplisit mengasosiasikan wacana ini dengan memori kelam Orde Baru. Treatment recommendation pada fase ini murni prosedural mendesak evaluasi internal netralitas aparat tanpa mengubah garis komando.

Pergeseran paradigma (paradigm shift) terjadi mulai berita ke-11 pada periode akhir (Oktober 2025–Februari 2026), dipicu oleh gelombang demonstrasi masyarakat sipil Agustus 2025 yang memprotes penyalahgunaan wewenang kepolisian, serta pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden. Tempo.co membalikkan seluruh elemen framing-nya status quo Polri kini didefinisikan sebagai anomali ketatanegaraan yang melahirkan “kekuasaan super (superbody)” rentan arogansi dan abuse of power, diagnosis bergeser dari manuver parpol menjadi akumulasi kekecewaan publik, dan rekomendasi berubah drastis menjadi mendesak percepatan reorganisasi garis komando ke kementerian. Yang konsisten bukanlah posisi Tempo.co, melainkan pertanyaan watchdog klasik yang terus diajukan: kekuasaan

siapa yang tidak diawasi dengan baik, dan bagaimana kekuasaan itu perlu dikontrol.

Pembingkaian Kompas.com:

Stabilitas Institusional dan Status Quo

Berbeda dengan Tempo.co, Kompas.com menunjukkan kecenderungan stabilitas institusional dan status quo yang konsisten di seluruh 11 berita yang dianalisis. Kompas.com tidak pernah mempersoalkan siapa yang menyalahgunakan kekuasaan, pertanyaan yang terus-menerus diajukan adalah soal kematangan kebijakan apakah reposisi ini telah dipikirkan secara matang dan seberapa besar risikonya bagi stabilitas negara jika diambil tergesa-gesa. Definisi masalahnya mengarah pada “pilihan kebijakan yang dilematis” berisiko memicu “kebuntuan komunikasi politik”; penilaian moralnya mengedepankan legitimasi dari suara ormas keagamaan (Muhammadiyah) untuk menegaskan bahwa mempertahankan status quo adalah langkah paling tepat dan rekomendasinya konsisten mengunci pada penguatan pengawasan eksternal seperti Korpri serta

pembenahan kultural internal, bukan perubahan struktural.

Kecenderungan aktual Kompas.com yang condong kontra-reposisi ini teridentifikasi dari komposisi narasumber: porsi kutipan jauh lebih besar diberikan kepada pihak yang menolak reposisi (Komisi III DPR, Kompolnas, TNI, Muhammadiyah) dibandingkan pihak pengusul, yang porsinya hanya sebagai elaborasi latar belakang. Kendati demikian, asas keberimbangan formal (formal balance) tetap diupayakan dengan tetap menyalurkan narasi PDI-P sebagai pengusul, bahkan sempat menyebut ide pemisahan Polri dari Presiden sebagai “wacana positif” yang lazim diterapkan di negara-negara maju demi profesionalisme kepolisian sipil, pola yang sudah diteliti oleh (Muslyha et al., 2025) diidentifikasi sebagai representasi khas jurnalisme Kompas yang mengutamakan moderasi dan harmoni sosial demi melindungi konsensus nasional hasil reformasi.

Ditinjau elemen demi elemen, perbedaan logika kedua media semakin tampak jelas: pada define problems, Tempo.co bergerak dari kerangka yuridis-formal menuju

kerangka sosiologis-struktural, sementara Kompas.com tidak beranjak dari kerangka manajerial-kehati-hatian. Pada diagnose causes, Tempo.co menambahkan aktor kolektif massa aksi pada fase kedua, sementara Kompas.com tetap mengunci diagnosis pada aktor-aktor formal. Pada make moral judgment, Tempo.co beralih dari otoritas civil society menuju otoritas moral publik, sedangkan Kompas.com konsisten merujuk otoritas keagamaan dan kelembagaan formal, pilihan editorial yang menurut (Hamad, 2004) mencerminkan konstruksi ideologis media atas realitas politik. Temuan ini memperkaya peta kajian framing atas institusi Polri yang sebelumnya lebih berfokus pada peristiwa insidental (Amin et al., 2022), berbeda dengan isu kebijakan kelembagaan berlarut-larut dalam penelitian ini yang justru membuka ruang bagi pergeseran bingkai yang dinamis.

Perbandingan Antarmedia

Perbedaan orientasi kedua media juga tampak jelas pada pilihan diksi. Tempo.co secara konsisten menggunakan diksi konfrontatif dan tajam seperti “anomali ketatanegaraan”, “kekuasaan super (superbody)”, “arogansi aparat”,

hingga frasa ekstrem “negara kepolisian” untuk membangun urgensi dan risiko di benak pembaca. Sebaliknya, Kompas.com secara konsisten memilih diksi netral, administratif, dan bernuansa akademis-hukum seperti “pilihan kebijakan yang dilematis” dan “kebuntuan komunikasi politik”, secara sadar menghindari pelabelan yang menyudutkan institusi keamanan secara personal pemilihan kata dan citra (keywords and images) yang menurut (Entman, 1993) merupakan salah satu perangkat kerja framing yang penting selain seleksi dan penonjolan aspek. Tabel 1 merangkum perbandingan keempat elemen framing pada kedua media.

Konfirmasi Temuan dengan Teori

Kecepatan kedua media memublikasikan dan memperbarui pemberitaan seiring bergulirnya dinamika ketatanegaraan mengonfirmasi karakteristik media online yang menempatkan immediacy sebagai pilar utama. Lebih jauh, arah konstruksi teks yang kontras mengonfirmasi teori mediatisasi politik (Strömbäck & Esser, 2014). Tempo.co menerapkan logika jurnalisme kritis-investigatif (watchdog logic) yang membingkai Polri sebagai lembaga

bermasalah akuntabilitas, sementara Kompas.com bersandar pada logika keberimbangan formal yang membingkai Polri sebagai pilar stabilitas keamanan.

Pertarungan framing ini juga mengonfirmasi teori konstruksi realitas sosial (Berger & Luckmann, 1991) pada tahap eksternalisasi, kedua media mengumpulkan fakta mentah yang sama dari ruang publik, pada tahap objektivasi, Tempo.co mengonstruksi Polri sebagai institusi “anti-evaluasi” sedangkan Kompas.com mengonstruksinya sebagai institusi profesional yang procedural, dan pada tahap internalisasi, pemahaman publik mengenai netralitas Polri pada akhirnya terbentuk dari realitas hasil bentukan media, bukan realitas asli. Temuan ini selaras dengan penelitian Adinda dan Azeharie (2023) serta Muslyha dkk. (2025), bukti bahwa perbedaan logika media antara Tempo.co dan Kompas.com bukan sekadar asumsi, melainkan pola yang termanifestasi berulang lintas isu.

Pada tataran yang lebih substantif, temuan ini turut mengonfirmasi prinsip tata kelola dan reformasi keamanan sipil yang demokratis, bahwa penataan struktur

kepolisian nasional idealnya diarahkan untuk mengikis watak militeristik dan menempatkan institusi penegak hukum di bawah pengawasan sipil yang ketat (Wiatrowski & Goldstone, 2010). Rekomendasi struktural Tempo.co sejalan dengan pandangan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian sipil dapat memperkuat akuntabilitas administratif, namun kajian yang sama juga mencatat kekhawatiran sebaliknya, langkah itu berisiko membuka celah intervensi politik praktis yang lebih besar mengingat posisi menteri adalah jabatan politik (Thamrin, 2023) kekhawatiran yang justru menjadi argumen inti Kompas.com dalam mempertahankan status quo. Perbedaan framing antara kedua media dengan demikian bukan semata persoalan teknis jurnalistik, melainkan mencerminkan benturan visi mengenai format ideal reformasi kelembagaan kepolisian dalam demokrasi Indonesia.

Konsistensi kedua media dalam mengulang isu ini pada dua gelombang pemberitaan yang terpisah hampir satu tahun juga relevan dibaca melalui teori agenda setting (McCombs, 2008), yang

menegaskan bahwa penonjolan isu secara berulang oleh media massa turut menentukan tingkat kepentingan isu tersebut di benak publik, terlepas dari arah pembingkaiannya.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tempo.co dan Kompas.com membingkai isu penempatan Polri di bawah Kemendagri secara berlawanan arah meskipun meliputi fenomena dan rentang waktu yang sama. Tempo.co menunjukkan kecenderungan reformasi struktural yang dinamis, bergeser dari posisi kontra-reposisi menjadi pro-reposisi setelah dipicu demonstrasi masyarakat sipil dan pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri, sebagai wujud fungsi watchdog pers. Kompas.com menunjukkan kecenderungan stabilitas institusional dan status quo yang konsisten, secara substantif condong menolak reposisi di balik bingkai keberimbangan formal. Perbedaan ini membuktikan bekerjanya mediatisasi politik di Indonesia, di mana media online bukan saluran netral, melainkan aktor aktif yang menggerakkan logika medianya sendiri dalam menentukan arah pemaknaan publik.

Secara praktis, Polri disarankan menjadikan sorotan kritis Tempo.co sebagai bahan evaluasi objektif yang dijawab melalui perbaikan kinerja dan keterbukaan pengawasan, bukan manajemen citra semata. Media online disarankan tetap menjaga independensi dan ruang klarifikasi yang adil bagi seluruh aktor ketatanegaraan. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas metode dengan wawancara mendalam bersama redaksi, serta memperluas objek kajian pada media digital alternatif berbasis gerakan masyarakat sipil.

Daftar Pustaka

- Adinda, S., & Azeharie, S. S. (2023). Framing pada media daring Kompas.com dan Tempo.co terhadap pemberitaan isu Konsorsium 303 kasus Ferdy Sambo. *Koneksi*, 7(1), 163–171. <https://doi.org/10.24912/kn.v7i1.21344>
- Amin, M. F., Ramdhani, M., & Oxcygentri, O. (2022). Analisis framing pemberitaan aksi teror Mabes Polri pada media online Kumparan dan Tirto.id. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 221–230. <https://doi.org/10.23969/linimasa.v5i2.5229>
- Antara. (2024a). Sejarah Polri dan ABRI berpisah: Awal reformasi kepolisian Indonesia. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4506629>
- Antara. (2024b, Desember 2). Tito Karnavian tolak usulan Polri di bawah struktur Kemendagri. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4506689>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). *The social construction of reality*. Penguin Books.
- Bittner, J. R. (1980). *Mass communication: An introduction* (2nd ed.). Prentice-Hall.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriyanto. (2012). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik*. LKiS Group.
- Hamad, I. (2004). Konstruksi realitas politik dalam media massa (studi pesan politik dalam media cetak pada masa pemilu 1999). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1).
- Hasibuan, C. I. A. A., Harahap, M. R., & Pane, S. J. S. (2026). Analisis framing dalam teks editorial “Kuasa Polisi dalam KUHAP” di media online Tempo. *Journal of Media and Communication*, 2(3), 68–70. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1194>
- Kardi, K. (2014). Demokratisasi relasi sipil–militer pada era reformasi di Indonesia. *Masyarakat: Jurnal*

- Sosiologi, 19(2), 106–131.
<https://doi.org/10.7454/MJS.v19i2.1246>
- Kurniawan, H. F. (2025). Eksistensi Kepolisian RI di tengah disrupsi politik dan citra institusi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10.
- McCombs, M. (2008). Setting the agenda: The mass media and public opinion. *Journalism and Mass Communication Quarterly*.
- Muslyha, A., Boer, K. M., Nurliah, & W.S., J. A. (2025). Analisis framing pemberitaan dinasti politik Jokowi pada pemilu tahun 2024 di media online Kompas.com dan Tempo.co periode Oktober 2023. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5, 6239–6252.
- Reuters Institute. (2025). Media online yang paling banyak dibaca warga Indonesia awal 2025. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/685a588d7938d>
- Siregar, A. K., & Qurniawati, E. F. (2022). Analisis framing pemberitaan buzzer di tempo.co. *Journal of New Media and Communication*, 1(1), 1–15.
- Strömbäck, J. (2016). Mediatization. In *The international encyclopedia of political communication* (pp. 1–9). Wiley.
<https://doi.org/10.1002/9781118541555.WBIEPC124>
- Strömbäck, J., & Esser, F. (2014). Mediatization of politics: Transforming democracies and reshaping politics. In *Mediatization of communication* (pp. 375–404). De Gruyter.
<https://doi.org/10.1515/9783110272215.375>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tempo.co. (2024). Wacana Polri di bawah Kemendagri, rencana lama dan alasan di baliknya. <https://www.tempo.co/politik/wacana-polri-di-bawah-kemendagri-rencana-lama-dan-alasan-di-baliknya-1175221>
- Thamrin, H. (2023). Menyoal kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara demokrasi. *Jurnal Legalitas*, 1(1).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418>
- Wiatrowski, M. D., & Goldstone, J. A. (2010). The ballot and the badge: Democratic policing. *Journal of Democracy*, 21(2), 79–92.
<https://doi.org/10.1353/JOD.0.0168>